

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU

Meizar Hidayatul Aqli

NPP. 30.1402

*Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Studi Administrasi Pemerintahan*

Email: 30.1402@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Teresa Irmina Nangameka, S.STP, M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The main problem in this study is how effective is the implementation of SIMPEG at the Maluku Province Regional Personnel Agency as well as the inhibiting and supporting factors and the efforts made to make SIMPEG effective at the Maluku Province Regional Personnel Agency. **Purpose:** This study aims to describe how effective the application of SIMPEG is at the Maluku Provincial Civil Service Agency. **Method:** The research method used in this research is descriptive research which is to systematically describe the facts and characteristics of the object or an object that is being studied precisely. The data collection techniques in this study are by observing, interviewing and documenting. **Result:** The results of this study show that the effectiveness of SIMPEG implementation at the Regional Personnel Board of the Maluku province has been running quite effectively. **Conclusion:** In the implementation, the implementation has been optimal, but there are several inhibiting factors, namely the lack of competent human resources in applying SIMPEG and the lack of integrity between fields at BKD Maluku Province and the lack of strong commitment from other OPDs to employee data so that close relations are not created in coordination and communication in providing employee data and information.

Keywords: Effectiveness, Application, SIMPEG

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penerapan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku serta faktor penghambat dan pendukung dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengefektifkan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan seberapa efektif penerapan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mana adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau suatu benda yang diteliti secara tepat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini adalah, menunjukkan efektivitas penerapan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah provinsi Maluku sudah berjalan dengan cukup efektif. **Kesimpulan:**

Dalam pelaksanaan penerapannya sudah optimal akan tetapi ada beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mampu dalam mengaplikasikan SIMPEG serta belum terintegritasnya antar bidang pada BKD Provinsi Maluku serta kurangnya komitmen kuat OPD lain terhadap data pegawainya sehingga tidak tercipta hubungan erat dalam koordinasi dan komunikasi dalam memberikan data dan informasi pegawai.

Kata kunci: Efektivitas, Penerapan, SIMPEG

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Birokrasi di Indonesia selalu berkembang menyesuaikan perkembangan era digitalisasi revolusi industri 4.0 sekarang ini. Melalui reformasi birokrasi pemerintah hadir untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang timbul akibat kemajuan digitalisasi tersebut. Untuk membenahi birokrasi Indonesia, khususnya untuk melaksanakan reformasi kepegawaian, perubahan manajemen kepegawaian sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan tata pemerintahan yang lebih demokratis. Teknologi informasi berperan penting dalam upaya pembenahan dan perbaikan birokrasi sebagai wujud dari implementasi reformasi birokrasi yang ideal dan modern.

Munculnya *e-government* secara nasional didorong melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden ini dijadikan sebagai acuan kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasi pelaksana *e-government*. Dalam peranan *e-government* hampir keseluruhan jenis aplikasi yang digunakan melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah maupun *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Hadirnya sistem informasi manajemen ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam halnya mengambil keputusan yang tepat dengan patokan pada suatu system manajemen yang akurat, ini selaras dengan pendapat davis yang mengatakan bahwa Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi (Davis, 2002:3). Demi mendukung kebijaksanaan tersebut, dipandang perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang merupakan sub-sistem dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Hal ini menjadi sangat penting dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah maupun pemberdayaan aparatur pemerintah Daerah (Ridwan Para et al., n.d.).

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang berbasis web bertujuan dalam pengolahan data pegawai yang masuk untuk menjadikan sebagai salah satu informasi kepegawaian yang saling terintegrasi dalam lingkup pemerintahan (Hidayat, 2021). SIMPEG memperoleh input yang berupa data pegawai-pegawai yang selanjutnya data pegawai-pegawai tersebut diolah sehingga bisa menghasilkan informasi. Pelaksanaan SIMPEG ini telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkhusus pada pasal 127 ayat (1) menyatakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem informasi ASN.

Secara nasional penyelenggaraan manajemen kepegawaian dikoordinir oleh BKN, sementara itu untuk urusan manajemen kepegawaian di provinsi Maluku sendiri dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah provinsi Maluku. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku menyadari benar bahwa kinerja pemerintah akan berubah secara signifikan, jika reformasi sistem manajemen pemerintahan yang baik, pengelolaan lembaga publik dan infrastuktur maupun sumber

daya pemerintah dilaksanakan. Karena proses kelembagaan terus meningkatkan proses pengadaan di instansi pemerintah, reformasi sektor pemerintah memiliki berupaya mengubah fokus akuntabilitas dan hasil (*output and outcomes*). Sebagaimana Menurut Robert G. Murdick dan Joel E. Ross dalam Sutabri (2016: 91) sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi dimana informasi masukan (input) direkam, disimpan dan diproses untuk menghasilkan output yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian dan pengawasan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

SIMPEG dibuat guna mempermudah pekerjaan maupun pendataan yang terintegrasi ke seluruh OPD Provinsi Maluku dalam bentuk link yakni <https://SIMPEG.malukuprov.go.id>. Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian di BKD provinsi Maluku, ada beberapa permasalahan didalamnya yakni mengenai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKD Provinsi Maluku seperti lemahnya server yang mengakibatkan aplikasi lambat pada saat penginputan data karena penggunaan dari pegawai yang banyak dalam waktu yang bersamaan hingga permasalahan terpenting yaitu terbatasnya kemampuan pegawai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini masih terdapat pegawai-pegawai yang sudah mendekati masa pension dengan mayoritas kurang mengerti dalam hal teknologi. Juga kurangnya disiplin ASN dalam pengumpulan data pribadi di SIMPEG. Dapat diketahui bahwa keadaan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku adalah 42 orang pegawai yang terdiri dari 14 orang dengan jenjang pendidikan S2, 22 orang dengan jenjang pendidikan S1/DIV dan 1 orang berjenjang pendidikan DIII, serta 5 orang pegawai lainnya berlatar belakang pendidikan SMK/SMP.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan gambaran dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Dalam proses penelitian, sangat penting untuk membandingkan hasil dari penelitian sebelumnya. Sekalipun terdapat perbedaan permasalahan dari teori yang digunakan, penelitian terdahulu dapat sangat membantu peneliti dalam mencari solusi penelitiannya dan dapat dijadikan sebagai perbandingan atau acuan untuk menunjukkan bagaimana perbedaan peneliti saat ini dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Chaerunnisa (2017) “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di BKD Provinsi Banten:”, dengan metode penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian Chaerunnisa adalah pada metode penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan SIMPEG pada BKD Provinsi Banten sudah terlaksana efektif. Selanjutnya penelitian dari Widyawan (2020) “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda” memiliki perbedaan pada teori yang digunakan. Pada penelitian ini memakai teori efektivitas menurut Gibson dan Steers dalam Sumaryadi (2005:107) sedangkan pada penelitian Widyawan menggunakan teori implementasi menurut Edward III (1980) dan Indiahono (2009). Berdasarkan hasil penelitian Widyawan menyatakan bahwa penerapan simpeg pada BKPPD Kota Samarinda belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari kurangnya optimal pada aspek komunikasi hingga aspek SDM yang masih kurang pemahaman. Kemudian pada penelitian dari Rizky Natsir (2020) “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Toraja Utara” memiliki perbedaan pada teori yang digunakan. Pada penelitian Rizky natsir menggunakan teori menurut Hari Lubis dan Martini Huseini. Sedangkan

penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas menurut Gibson dan Steers. Hasil yang diperoleh dari penelitian Rizky Natsir menyatakan bahwa penerapan SIMPEG pada BKPPD Kabupaten Toraja Utara sudah berjalan cukup efektif akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan akibat kekurangan pegawai di bidang yang menangani SIMPEG.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian Daerah dengan metodenya yang digunakan menggunakan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori yang berbeda yakni Efektivitas (Gibson dan Steers dalam Sumaryadi (2005:107)) dengan 5 dimensi, yaitu Produksi atau produktivitas, Mutu/kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas, dan Kepuasan.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa efektif penerapan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan maupun upaya apa saja yang dilakukan.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau suatu benda yang diteliti secara tepat. Adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan induktif.

Dalam penelitian kualitatif agar mendapatkan data yang relevan dan dapat mendukung dalam pemecahan masalah penelitian, serta mendapatkan data dan informasi yang akurat. Maka disini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan 3 teknik analisis data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, Sekretaris BKD Provinsi Maluku, Kabid pengadaan dan informasi pegawai, Kasubid data dan informasi kepegawaian, Staff sub bidang informasi dan data, serta 3 orang Pegawai ASN Pengguna SIMPEG.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis dalam rangka meningkatkan pelayanan pada bidang administrasi kepegawaian terkhusus pada bidang data pegawai digunakan sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dimana adanya SIMPEG tersebut, data-data dari pegawai akan terhimpun dalam satu *database* kepegawaian yang nantinya juga dapat memperlancar dari proses administrasi kepegawaian. Pembangunan dan pengembangan dari aplikasi SIMPEG sendiri pada BKD Provinsi Maluku sudah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2017 yang dimana pada tahap awal data-data dari PNS sudah diinput. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

Penulis melihat tolak ukur keberhasilan dari keefektifan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dan Steers dalam Sumaryadi yang diketahui memiliki 5 dimensi. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan kelima dimensi tersebut yakni sebagai berikut :

a. Produktivitas

Gibson at all dan Steers dalam Sumaryadi mengemukakan bahwa Produktivitas suatu organisasi membutuhkan proses-proses yang terstruktur dan kemampuan yang memadai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai tujuan yang dimiliki suatu organisasi. Kelancaran dalam proses produksi tersebut mengukur efektivitas kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam organisasi tersebut.

1) Kemampuan SIMPEG dalam pengelolaan dan penyediaan data pegawai

Data pegawai yang disimpan dan tersedia pada database digunakan untuk seluruh pegawai pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang kemudian dapat berguna sebagai salah satu informasi kepegawaian. Adanya Sistem Komputer yang interaktif yang memiliki posisi pada model keputusan dan dikhususkan kedalam database pegawai yang dapat diakses langsung oleh setiap pegawai dan juga bisa digunakan dalam membantu manajemen kedalam semua jenis data pegawai serta semua SKPD yang terdapat pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kemampuan SIMPEG dalam pengelolaan dan penyediaan data pegawai pada BKD Provinsi Maluku yaitu untuk mengelolah semua data-data pegawai yang bekerja pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk dapat mengetahui jumlah kekurangan serta kelebihan pegawai pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2) Tuntutan dari pegawai terhadap SIMPEG

Tuntutan dari pegawai terhadap SIMPEG merupakan kunci dalam pelaksanaan penggunaan SIMPEG terhadap informasi kepegawaian. Dengan partisipasi pegawai terhadap tingkat penggunaan SIMPEG menjadikan SIMPEG dapat digunakan sesuai tujuannya yaitu mengelola data pegawai. Kesimpulannya bahwa pegawai hanya berpartisipasi dengan SIMPEG yang berkaitan dengan pemberian TPP contohnya tentang kinerja pegawai yang diupdate kedalam SIMPEG tersebut, akan tetapi bila berkaitan dengan data-data pribadi dari pegawai biasanya pegawai lambat dalam mengupdate data-data tersebut.

b. Mutu/kualitas

Mutu/kualitas merupakan kerja kualitas, produk yang dapat memenuhi harapan pelanggan ataupun klien untuk kinerja dari produk ataupun jasa., dengan ukuran dan penelitian mutu berasal dari pelanggan pengguna produk maupun jasa. Kualitas dan mutu sendiri merupakan salah satu dimensi dari efektivitas dalam penentuan efektivnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Terdapat dua sub-indikator untuk dapat mengukur dimensi mutu/kualitas, indikator tersebut antara lain pegawai dapat mudah menggunakan SIMPEG dan keamanan data pegawai pada SIMPEG.

1) Pegawai dapat mudah menggunakan SIMPEG

Pegawai dapat mudah menggunakan SIMPEG sebagai dasar dari terwujudnya suatu kualitas dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Pegawai dapat mudah menggunakan SIMPEG sangat berpengaruh terhadap keefektifan dari SIMPEG sendiri apakah aplikasi tersebut mudah digunakan ataupun sulit untuk dipahami pegawai dalam menggunakannya. Karena apabila pegawai sulit memahaminya maka bisa terjadi data-data pegawai yang tidak bisa di update oleh pegawai kedalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sehingga akan sulit bagi pegawai dikemudian hari untuk bekerja maupun untuk bisa mendapatkan TPP. Fitur-fitur yang diberikan pada aplikasi SIMPEG juga telah memudahkan para pegawai terkait penggunaan SIMPEG itu sendiri. Hal ini juga peneliti melihat langsung di lapangan bahwasannya hanya sedikit pegawai yang sulit dalam penggunaan SIMPEG itu sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pegawai sudah memahami dan mudah dalam menggunakan SIMPEG dalam mengelola data-data dari pegawai itu sendiri.

2) Keamanan data pegawai pada SIMPEG

Keamanan data pegawai pada SIMPEG merupakan salah satu kualitas atau mutu dari produk atau disini yaitu SIMPEG sendiri. Karena data pegawai sendiri merupakan suatu data penting yang tidak boleh apalagi bisa bocor ke orang lain yang tidak dapat bertanggung jawab. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa keamanan data pegawai pada SIMPEG diawasi langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informasi, data-data dari pegawai selalu diawasi dan dijaga oleh Diskominfo, apabila terdapat celah maka langsung Diskominfo menghubungi BKD. Kemudian keamanan data pegawai sendiri dapat bocor ataupun tersebar bisa terjadi akibat kelalaian dari masing-masing pribadi pegawai, akibat belum menggantinya kata sandi lamanya yang dari NIP mereka. Tetapi sejauh ini belum ada kebocoran data pegawai dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

c. Efisiensi

Efisiensi menurut Gibson dalam Sumaryadi (2005:107) megartikan sebagai rasio keluaran disbanding masukan, memfokuskan pada siklus, masukan – proses – keluaran, serta bahkan menekankan terhadap elemen masukan dan proses. Indikator efesiensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana penginputan data pegawai pada SIMPEG, alur pengelolaan data pada SIMPEG serta tampilan data pada SIMPEG.

1) Penginputan data pegawai pada SIMPEG

Penginputan data pegawai dapat dilakukan apabila semua data pegawai sudah terkumpul sehingga kemudian dapat di input ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Kesimpulan bahwasannya penginputan data pegawai pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang mana data yang diinput tersebut harus sesuai dengan fitur tampilan yang ada didalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian tersebut sehingga ketika membuka tampilan SIMPEG akan sesuai dengan data yang sebenarnya. Standar Operasional Prosedur mempunyai fungsi sebagai cara untuk memudahkan tahapan-tahapan bagaimana cara untuk penginputan data pegawai sebagai suatu informasi kepegawaian. Hal ini berkaitan dengan indikator

efisiensi yang mana efisiensi memfokuskan kepada siklus masukan – proses – keluaran data informasi kepegawaian.

2) Alur pengelolaan data pada SIMPEG

Alur pengelolaan data pegawai pada SIMPEG merupakan sebuah bagian dari pengolahan data pegawai yang diman menghasilkan sebuah informasi kepegawaian yang dapat digunakan sebagai informasi administrasi pegawai. Hasil observasi yang dilakukan terdapat perangkat komputer yang menjadi penunjang berjalannya alur pengolahan data pegawai pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terdapat 10 (sepuluh) unit yang sudah tersambung dengan jaringan LAN maupun WIFI, serta perangkat dukungan berupa scan dan printer yang masing-masing berjumlah 3 (tiga) unit. Peneliti memberi kesimpulan bahwan alur data pegawai pada SIMPEG sudah melalui tahapan penginputan data yang berdasarkan dengan data dari formulir para pegawai yang langsung masuk kedalam SIMPEG secara otomatis aplikasi SIMPEG memberikan tampilan data pegawai jenis data pegawai yang diinput.

3) Tampilan data pada SIMPEG

Tampilan data pada SIMPEG merupakan bagian dari efisiensi pengelolaan data pegawai yang dimana bagaimana SIMPEG dapat menampilkan menu data-data pegawai. Dari hasil dokumentasi peneliti mendapat tampilan menu utama dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang mana pada menu utama tersebut terdapat sub-sub menu yang menjadikan data-data pegawai terbagi menurut jenis datanya. Tampilan menu utama SIMPEG juga dilihat sangat mudah untuk dipahami dan digunakan oleh para pegawai sebagai pengguna dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Peneliti memberi kesimpulan tampilan data pegawai pada SIMPEG telah dibuat secara modern tidak seperti tampilan-tampilan pada website lama yang dapat membingungkan para pengguna sehingga SIMPEG dapat mudah untuk digunakan oleh para penggunanya.

d. Fleksibilitas

Indikator fleksibilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan adaptasi SDM dan sumber daya lainnya dalam mengelola database SIMPEG serta pengembangan teknologi informasi di bidang SIMPEG.

1) Kemampuan adaptasi SDM dan sumber daya lainnya dalam mengolah database SIMPEG Hasil observasi yang dilakukan peneliti di tempat penelitian peneliti melihat dan mengamati terkait adaptasi kemampuan adaptasi SDM terhadap penggunaan SIMPEG. Peneliti menemukan banyak pegawai yang sudah paham serta mampu untuk menggunakan fitur dan beradaptasi terhadap penggunaan SIMPEG terkait informasi kepegawaian. Kesimpulan para sumber daya manusia yang mana pegawai yang mengelolah database SIMPEG telah diposisikan berdasarkan dengan latar belakang dari pendidikan mereka, mereka juga sudah mampu dalam mengelolah database dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Kemudian para pegawai pengguna SIMPEG juga telah mampu dan paham mengenai penggunaan SIMPEG.

2) Pengembangan teknologi informasi di bidang SIMPEG

Sarana teknologi merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan sarana yang dimiliki sudah atau belum dan bagaimana kemudahan dalam mengaksesnya. Hal ini yang berkaitan dengan sarana penunjang terkait penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah perangkat komputer. Adapun sarana teknologi yang terdapat pada Subbidang Informasi dan Data pegawai yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, yang terdiri atas : Komputer, Jaringan LAN dan *WIFI*, Printer, dan Scan. Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku telah memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pengapilkasian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

e. Kepuasaan

Output yang dihasilkan merupakan produk serta manfaat yang diperoleh pegawai akan hal tersebut dalam sehari-hari.

1) Manfaat SIMPEG

Manfaat dari penerapan SIMPEG sendiri sebagai pegawai pengguna SIMPEG adalah yang paling penting kemudahan dalam mengakses data, kemudahan pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi kepegawaian sangat penting dan bermanfaat. Karena sebagai pegawai sendiri mempunyai 3 item yang harus dipenuhi oleh pegawai dalam SIMPEG, yang pertama absensi pegawai, kinerja pegawai serta pembayaran TPP pegawai ada dalam SIMPEG. Jadi manfaat SIMPEG itu juga banyak karena SIMPEG sendiri terintegrasi dengan seluruh data pegawai.

2) Penggunaan kembali SIMPEG

Penggunaan kembali SIMPEG oleh pegawai sangat baik, hal ini juga karena SIMPEG sendiri berpengaruh terhadap kinerja mauppun pemberian TPP para pegawai.

3) Respon pegawai terhadap adanya SIMPEG

Respon pegawai terhadap adanya Sistem Informasi Manajemen Pegawai bahwa pegawai merasa puas dan merasa dimudahkan dalam urusan manajemen kepegawaian maupun dengan informasi tentang kepegawaian.

3.2 Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

Adapun yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku diantaranya faktor internal serta faktor eksternal.

a) Faktor Internal

Faktor penghambat dari sisi internal yaitu belum terintegrasi antara bidang contohnya Subbidang pensiun yang belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, kemudian pada bidang Disiplin Pegawai sementara sedang diusahakan seperti e-kinerja yang sudah terintegritas dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian akan tetapi pada bidang yang lain belum seperti Mutasi, dan pensiun.

b) Faktor Eksternal

Faktor penghambat dari sisi eksternal sendiri adalah Sumber Daya Manusia salah satunya Sumber Daya Manusia yang belum memahami dalam penggunaan teknologi, kemudian juga belum adanya komitmen yang kuat dari OPD lain terhadap data pegawainya nanti ketika ada momen-momen tertentu baru mereka sibuk dengan data para pegawainya.

Peneliti menganalisa bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan SIMPEG pada BKD Provinsi Maluku, antara lain :

- 1) Belum terintegrasi antara bidang contohnya Subbidang pensiun yang belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan pada bidang Disiplin Pegawai sementara sedang diusahakan seperti *e-kinerja* yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang ada.
- 3) Sumber Daya Manusia salah satunya Sumber Daya Manusia yang belum memahami dalam penggunaan teknologi.
- 4) Kurangnya data yang berkualitas, data yang berkualitas sendiri mencakup keakuratan data, tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta lengkap.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.

a) Faktor Internal

Faktor pendukung dari sisi internal sendiri yaitu pimpinan OPD yang mana disini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah memiliki komitmen untuk penerapan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian serta pengembangannya, serta penerapannya di seluruh OPD setingkat provinsi pada lingkup Pemerintahan Provinsi Maluku kemudian infrastruktur dalam mendukung penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

b) Faktor Eksternal

Para pimpinan dari berbagai OPD telah siap dan memiliki komitmen dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian agar data para pegawai dapat terdata dan terintegrasi dalam memudahkan dalam manajemen kepegawaian maupun informasi kepegawaian. Kemudian Infrastruktur jaringan yang bagus, di Maluku sudah memiliki jaringan yang bagus.

Peneliti menganalisa bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan SIMPEG pada BKD Provinsi Maluku, antara lain

- 1) Pemerintah berkomitmen dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam upaya mengintegritas data-data pegawai provinsi dalam upaya memudahkan dalam kegiatan manajemen kepegawaian maupun informasi kepegawaian.

- 2) Infrastruktur yang mendukung dalam penerapan Sistem informasi Manajemen Kepegawaian.

3.3 Upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam menyelesaikan permasalahan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Upaya langsung yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam menyelesaikan permasalahan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan cara melakukan penambahan jumlah sarana dan prasarana yang telah dianggarkan pada tahun depan. Diharapkan juga dengan menambah pegawai yang bisa mengaplikasikan Sistem Informasi yang ada. Kemudian dengan memberikan kesadaran pada pegawai untuk tanggap serta memahami pentingnya memberikan data pegawai ke bidang Informasi dan Data Pegawai.

Upaya tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam menyelesaikan permasalahan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah dengan cara melakukan koordinasi kepada seluruh OPD yang ada dilingkup Pemerintah provinsi Maluku terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) memberikan banyak manfaat pada pemerintahan Provinsi Maluku terhadap manajemen kepegawaian. SIMPEG merupakan salah satu sarana yang berfungsi dalam tujuan manajemen kepegawaian terutama pada administrasi kepegawaian sehingga membantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam mengelola administrasi kepegawaian. SIMPEG sendiri dapat memudahkan pegawai dalam penginputan serta pengelolaan data pegawai yang terdapat dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku secara efektif. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Chaerunnisa yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari harga t atau jatuh pada penerimaan H_0 ($3,72 > 1,66901$), maka H_0 atau hipotesis nol diterima, dan H_a atau hipotesis kerja ditolak. Efektifitas penerapan SIMPEG di BKD Provinsi Banten juga sudah efektif karena hasil penelitian sebesar 5.828 lebih besar dari batas kategori belum efektif yaitu 5.363 (Chaerunnisa 2017).

Penerapan SIMPEG sendiri juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya seperti belum terintegrasinya antar bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, Sumber Daya Manusia salah satunya Sumber Daya Manusia yang belum memahami dalam penggunaan teknologi serta kurangnya data yang berkualitas. Sama seperti penelitian yang dilakukan saudara Widyawan, Penerapan SIMPEG sendiri terdapat kekurangan sumber daya manusia yang masih terbatas, pegawai yang tidak semuanya bisa mengoperasikan atau menggunakan komputer hingga keterlambatan pada update data pegawai (Widyawan 2020). Adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ini juga dapat diharapkan secara jangka panjang untuk menciptakan data-data pegawai yang lebih bermutu maupun lebih akurat serta memudahkan dalam manajemen kepegawaian secara langsung layaknya penelitian Riski

Natsir yang menemukan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pada era ini maka BKKPD Kota Toraja sangat membutuhkan SIMPEG dalam menghasilkan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah serta membantu pimpinan dalam merencanakan formasi, pengadaan, penerimaan, merencanakan mutasi, promosi/demosi, penyebaran pegawai dan merencanakan pelatihan pegawai di masa yang akan datang (Riski Natsir, 2018)

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan hambatan sehingga bagi penulis ada beberapa hal yang bisa dilakukan yakni, Dibangun integritas antar bidang yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, sehingga terbentuknya jalinan koordinasi antar bidang guna kepentingan dari manajemen informasi kepegawaian pada SIMPEG. Serta, Meningkatkan sistem update data pada SIMPEG sehingga data pegawai dapat diperbaharui dengan otomatis, tanpa harus diinput oleh pengelola SIMPEG.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sudah cukup baik, yang mana dalam pelaksanaannya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sudah cukup baik karena dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan *Standart Operational Procedure (SOP)*. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian juga sudah dapat dipahami oleh para pegawai dalam penggunaannya. Para pegawai pengguna SIMPEG juga mendapat manfaat dari penggunaannya dalam informasi kepegawaian. Efektivitas tersebut dengan adanya faktor-faktor penghambat dan pendukung maupun upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam menyelesaikan permasalahan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SIMPEG.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Pemerintah Provinsi Maluku terkhusus Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yang telah menerima peneliti dalam menggali berbagai informasi tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Sumaryadi, I. N. 2005. Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah. Citra Utama.

B. Non Buku, Jurnal, Skripsi, dan Sumber Lain

Chaerunnisa. 2017. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

di BKD Provinsi Banten

Hidayat, F. 2021. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Lembaga Kursus Global Excellence Batam. <https://ejournal.stmikgici.ac.id/>

Ridwan Para, O. S., Lambelanova, R., Indrayani, E., & Ambon, P. K. (n.d.). Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Simpeg Dalam Manajemen Pegawai Di Kota Ambon Provinsi Maluku.

Rizky Natsir. 2020. Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Toraja Utara

Widyawan. 2020. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda

